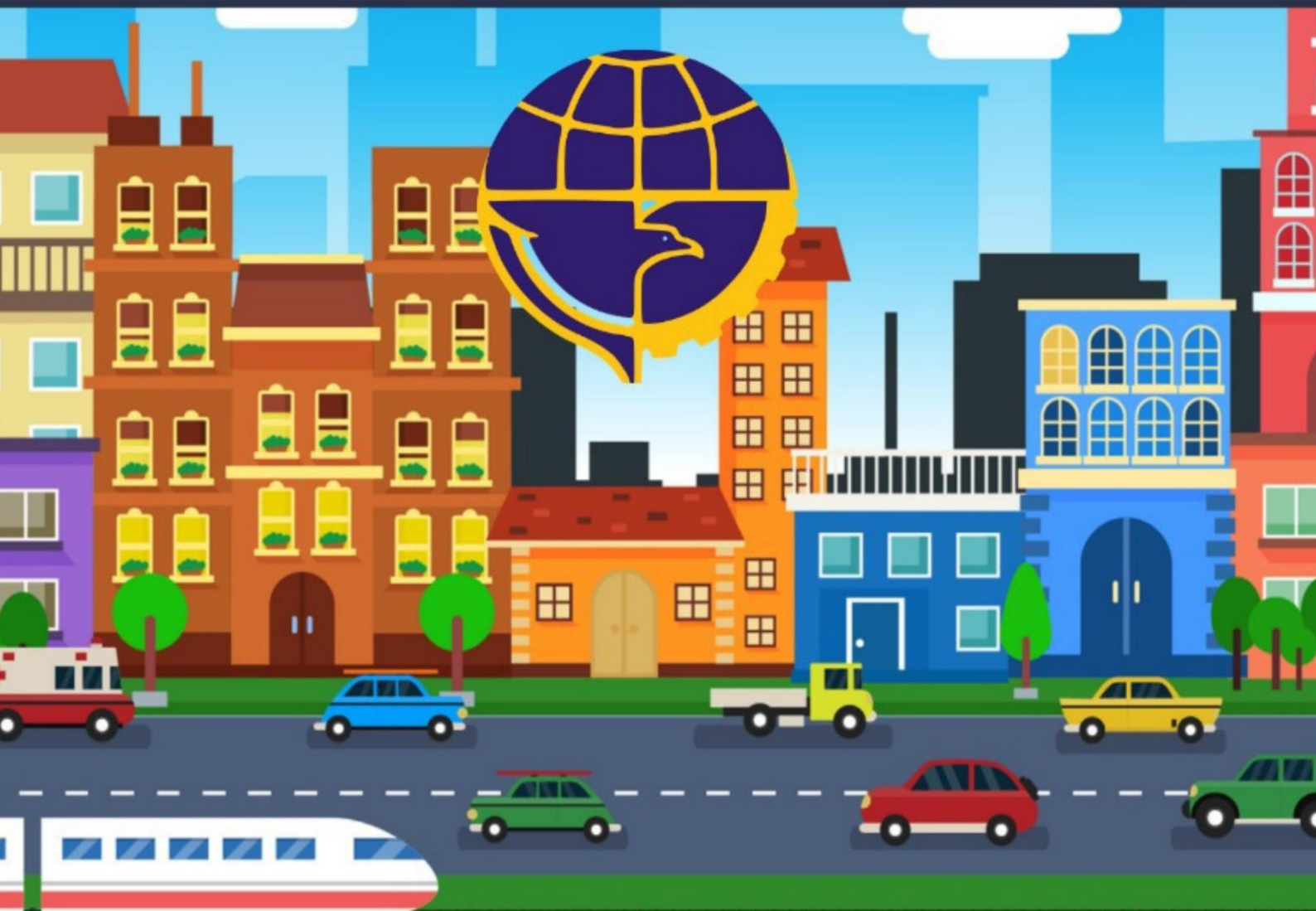


DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

LKjLP

TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441

Situs web : <http://dishub.blitarkota.go.id> E-mail : dishub@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...



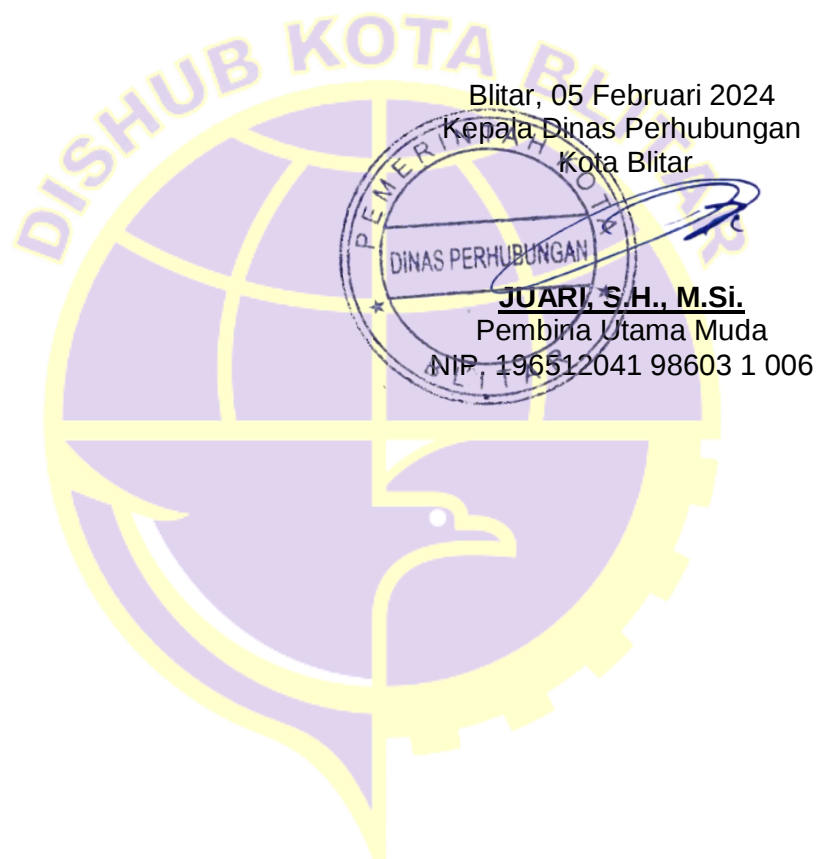
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Disamping itu LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam konteks pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, akan tetapi masih banyak juga permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan serta Visi dan Misi Kota Blitar.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas

Perhubungan Kota Blitar ini, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi pengambilan kebijakan/keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan disektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharap saran dan kritik yang membangun unrtuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah. Sedangkan Dinas Perhubungan menjalankan beberapa fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian serta pelayanan umum di bidang perhubungan.

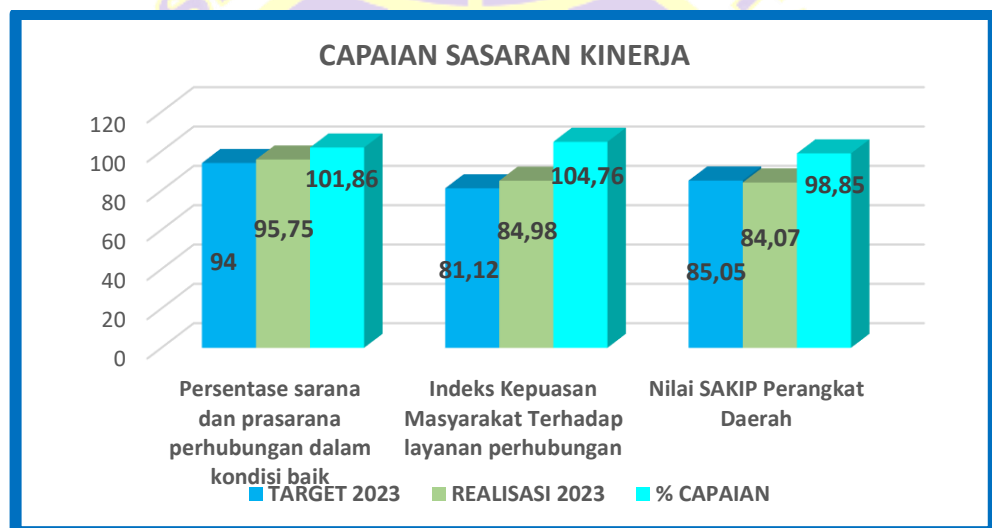
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam membangun Kota Blitar 5 (lima) tahun yang akan datang terdapat visi dan beberapa misi daerah yang diemban dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 yang mengakomodir urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perhubungan

Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka dapat ditentukan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

TUJUAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatnya Kualitas Perhubungan 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
SASARAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun pencapaian Kinerja Sasaran dapat ditunjukkan pada table berikut:



Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Blitar terdapat 2 (dua) indikator sasaran kinerja yang tercapai dan 1 (satu) indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai. Indikator sasaran kinerja yang tercapai yaitu :

- 1) Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Pada inikator ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya :

- ❖ Faktor pendukung : Terdapatnya SDM yang mencukupi dan berkompeten serta pemeliharaan berkala sesuai dengan kebutuhan dan standar ketentuan.
- ❖ Faktor penghambat : Masih terdapatnya beberapa sarana prasarana

perhubungan yang memerlukan penambahan maupun pemeliharaan rutin sesuai dengan kebutuhan perkembangan moda transportasi.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan. Pada indikator sasaran kinerja ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:

- ❖ Faktor pendukung : Terdapatnya SDM yang mencukupi dan berkompeten
- ❖ Faktor penghambat : Belum optimalnya sarana prasarana dalam upaya peningkatan layanan. Misalnya kapasitas armada angkutan sekolah gratis yang sangat terbatas, sehingga armada mengalami full loading.

Adapun Indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dari indikator sasaran kinerja ini ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya :

- ❖ Belum termanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
- ❖ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target yang telah diperjanjikan
- ❖ Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisien kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka untuk tahun 2024 direncanakan untuk melakukan desk keselarasan/ kesesuaian antar Perjajian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai sekaligus Rencana Aksi berikut bukti dukungnya kepada seluruh ASN Dinas Perhubungan, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala sebagai bentuk sikap peduli dan komitmen dalam pencapaian target yang telah diperjanjikan. Selain itu monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dimanfaatkan dalam penyusunan

strategi dan kebijakan yang harus diambil dalam mencapai kinerja berikutnya. Dengan demikian secara langsung akan berpengaruh terhadap efektifitas dan efesian kinerja individu organisasi.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 berikut target dan realisasi kinerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	94	11.989.119.671,00	95,75	11.690.194.768,79	104,86	97,51	1,04
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,12	3.199.810.491,00	84,98	3.148.044.796,00	104,76	98,38	1,06
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,05	6.745.958.484,00	84,07	6.785.733.944,98	98,85	96,14	1,03

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1, *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 104,86% dibutuhkan anggaran sebesar 97,51%. Dan untuk sasaran 2, *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 104,76% membutuhkan anggaran sebesar 98,38%. Sedangkan untuk sasaran 3, *Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah* juga dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,85% dibutuhkan anggaran sebesar 96,14%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Dasar Hukum.....	14
E. Aspek – Aspek Strategis.....	17
F. Isu – Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	26
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 .	27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	35
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) ...	36

B. Akuntabilitas Keuangan	39
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	45
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	46
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
C. Prestasi / Penghargaan.....	53
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Langkah Perbaikan	56
Lampiran-lampiran	
I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026	
II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023	
III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang disertai dengan beberapa penjelasan atas pencapaian tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I. Kedudukan

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan:

- 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

II. Tugas Pokok dan Fungsi

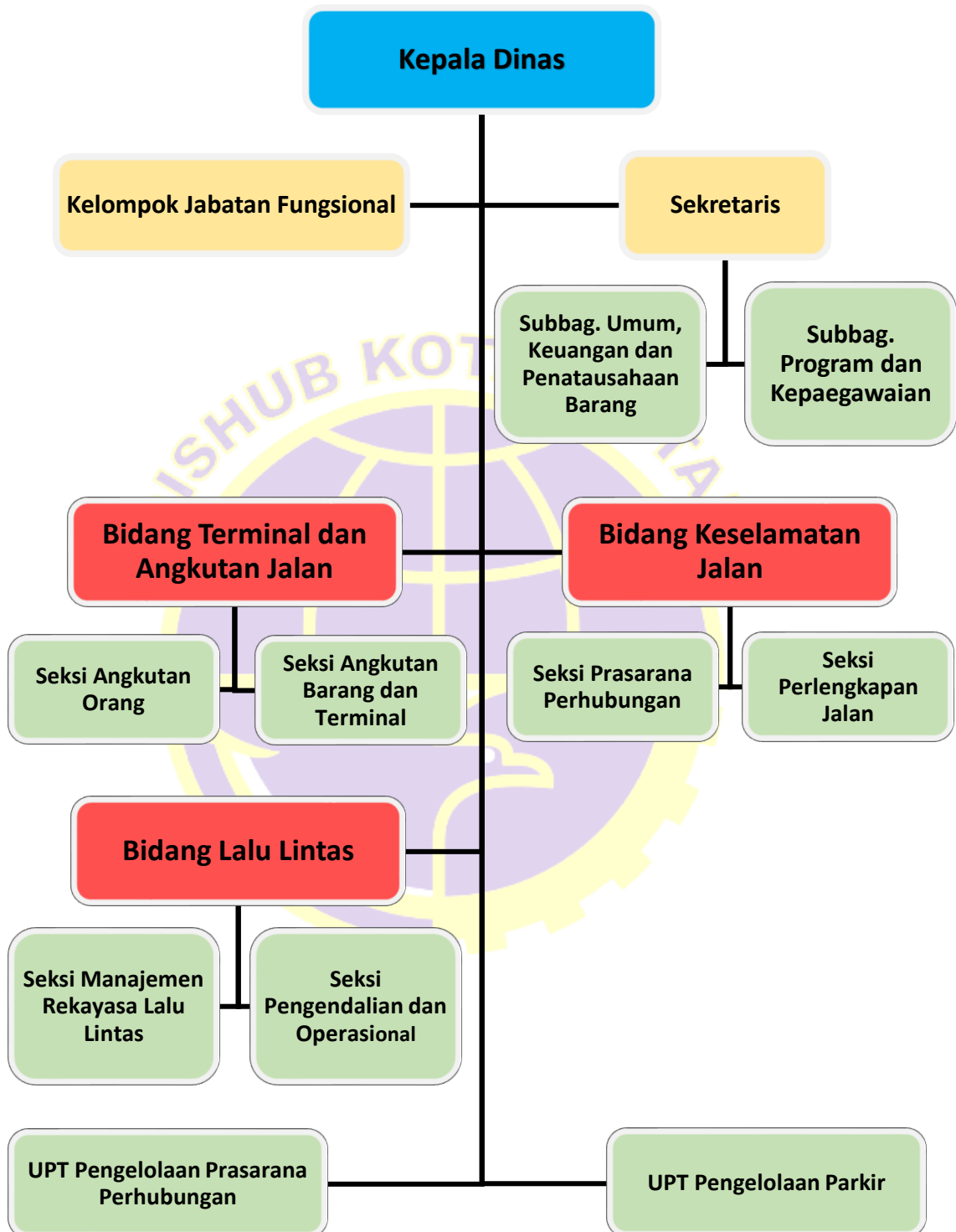
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di dalam lingkungan kantor;
10. Penyusunan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan IKM;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perhubungan secara berkala melalui *sub dominan website* Pemerintah Daerah dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai kewenangan:
 - a. Penetapan kebijakan operasional di bidang Perhubungan;
 - b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Perhubungan;
 - c. Perencanaan operasional program Perhubungan;
 - d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Perhubungan, di tingkat kota;
 - e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang Perhubungan;
 - f. Peremajaan data dalam bidang Perhubungan untuk tingkat kota;
 - g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2023, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
18. 5Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. Aspek – Aspek Strategis

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Blitar yang senantiasa membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar maupun bagi stakeholder lainnya. Aspek strategis pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu pengembangan prasarana perhubungan, seperti menerapkan PJU LED yang ramah lingkungan dan hemat energi, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan terminal tipe C, peningkatan layanan angkutan sekolah gratis dan peningkatan layanan uji berkala kendaraan berkala. Selain itu juga perlunya dilakukan pembinaan kinerja juru parkir tepi jalan umum dan Kawasan destinasi wisata serta sosialisasi edukasi akan pentingnya tertib berlalu lintas disetiap lapisan masyarakat guna terciptanya lalu lintas yang aman tertib dan lancar.

Strategi lain yang diusung Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu penerapan Aplikasi SIDABUS, yaitu aplikasi yang diperuntukan bagi pengguna jasa layanan angkutan sekolah gratis (siswa /pelajar Kota Blitar)

dengan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pengguna layanan serta diperolehnya data pengguna angkutan sekolah yang akurat. Selain itu Dinas Perhubungan juga membangun Aplikasi SILASAR, yang mana aplikasi ini memudahkan pengguna jasa perhubungan dalam melakukan aduan layanan, khususnya terkait sarana dan prasarana perhubungan (rambu, APILL, PJU). Pada aplikasi ini pengguna layanan cukup melaporkan kejadian atau aduan layanan melalui website dan WA centre yang disediakan, sehingga akan mempercepat proses penanganan.

Selain aspek strategis diatas, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga melakukan pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 3) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; 4) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal; 5) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan 6) Hasil Sewa BMD.

F. Isu – Isu Strategis

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil-hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal, oleh sebab itu perencanaan transportasi di suatu daerah harus

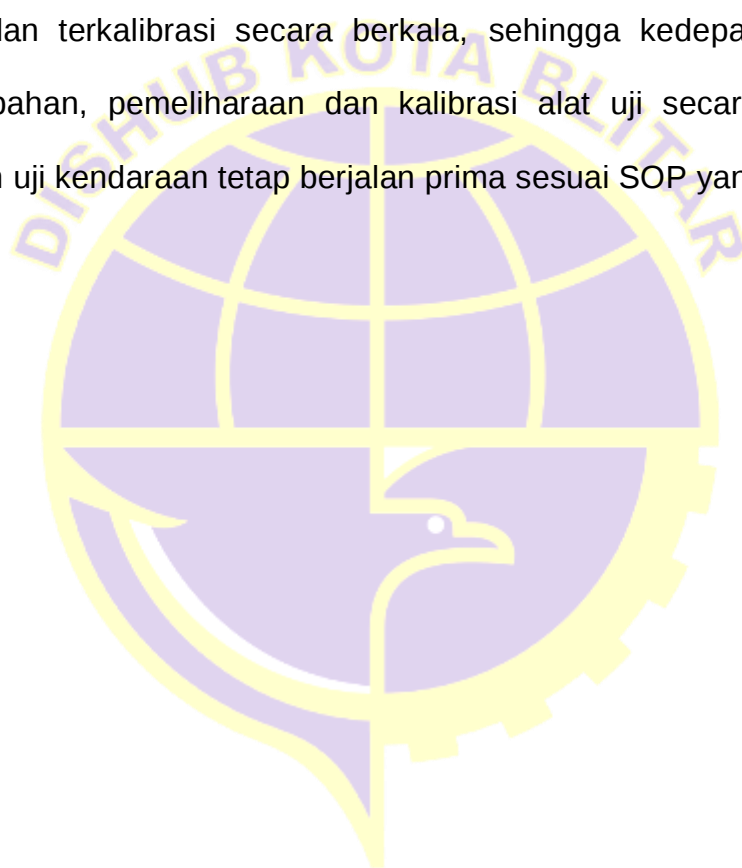
dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Melihat kondisi diatas maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, sehingga perlu penyediaan fasilitas utama maupun pendukung berdasarkan kebutuhan atas hasil kajian yang disusun sebelumnya;
2. Belum Optimalnya system pengelolaan parkir. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir tepi jalan umum dan rendahnya tingkat disiplin juru parkir dalam melakukan prosedur parkir di tepi jalan. Sehingga sangat perlu sekali untuk diadakan sosialisasi terhadap pengguna parkir di tepi jalan serta pembinaan terhadap juru parkir secara periodic dalam rangka peningkatan kinerja dan PAD dari sector retribusi parkir tepi jalan umum.
3. Belum optimalnya keselamatan jalan menuju smart city khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan, sehingga perlunya peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan;
4. Belum optimalnya pelayanan lalu lintas jalan, sehingga perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang kesadaran berlalu lintas kepada semua golongan pengguna jalan baik masyarakat umum maupun anak sekolah, agar tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Blitar dapat di minimalisasi selain itu juga perlunya manajemen rekayasa lalu lintas dalam menjaga

kestabilan arus jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan;

5. Belum optimalnya pelayanan uji kendaraan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan secara berkala. Sehingga perlunya sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya kendaraan laik jalan. Disisi lain untuk peningkatan layanan uji berkala juga dibutuhkan alat uji yang sesuai standar, layak dan terkalibrasi secara berkala, sehingga kedepan perlu adanya penambahan, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala, agar layanan uji kendaraan tetap berjalan prima sesuai SOP yang ditetapkan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurung waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi empat yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**.

Berdasarkan misi Kepala Daerah tersebut, maka ditetapkanlah satu tujuan dengan tiga sasaran. Dan Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas

rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing dikembangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Adapun strategi dimaksud dapat dirumuskan sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
			Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja tahun 2023 memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan program dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta formulasi perhitungan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilihat pada table II.2 berikut dan Lampiran 2 LKjIP Tahun 2023:

Tabel II.2
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Lalu Lintas dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Data sarpras perhubungan dan fasilitas keselamatan
2.	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan UPT Pengelolaan Parkir	Hasil penyusunan IKM layanan perhubungan
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Sekretariat	Hasil Penilaian SAKIP PD oleh Tim SAKIP Kota Blitar

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 ada 3 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, dan 3). Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III. Untuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

SASARAN 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	94

SASARAN 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Nilai	81,12 BAIK

SASARAN 3: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,05 A

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 3 LKj IP 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD.
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
-----------------------------------	----------	--

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
-----------------------------------	----------	--

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

No.	% Nilai Capaian Kinerja		Predikat
	%	Keterangan	
1	85% s.d. 100%	Delapan Puluh Lima persen sampai dengan Seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh Puluh persen sampai dengan kurang dari Delapan Puluh Lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Liam Puluh Lima persen sampai dengan kurang dari Tujuh Puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah Lima Puluh Lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Perhubungan guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagaimana ditunjukkan dalam table III.1 berikut.

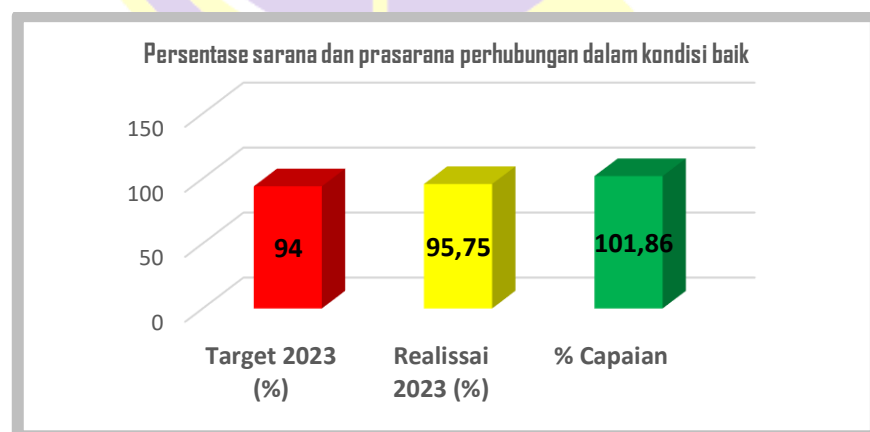
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	94	95,75	101,86
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,12	84,98	104,76
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,05	A 84,07	98,85

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1** : Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dengan indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* memperoleh capaian sebesar **101,86%**

Diagram 1:
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik sejumlah 133.245 dari total keseluruhan 134.807. Jumlah prasarana dan fasilitas

terminal dalam kondisi baik sejumlah 96 dari total keseluruhan 99. Jumlah fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 2.801 dari total keseluruhan 2.909. Sedangkan jumlah sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sejumlah 20 dari total keseluruhan 22.

- ❖ Formulasi perhitungan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* adalah rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik. Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebesar 98,84%, persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 96,97%, persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sebesar 96,29% dan persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 90,91%.
- ❖ Pada indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* terealisasi 95,75% dari target 94% dengan persentase capaian 101,86%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.
- ❖ Faktor pendorong : Terdapatnya SDM yang mencukupi dan berkompeten serta pemeliharaan berkala sesuai dengan kebutuhan dan standar ketentuan.

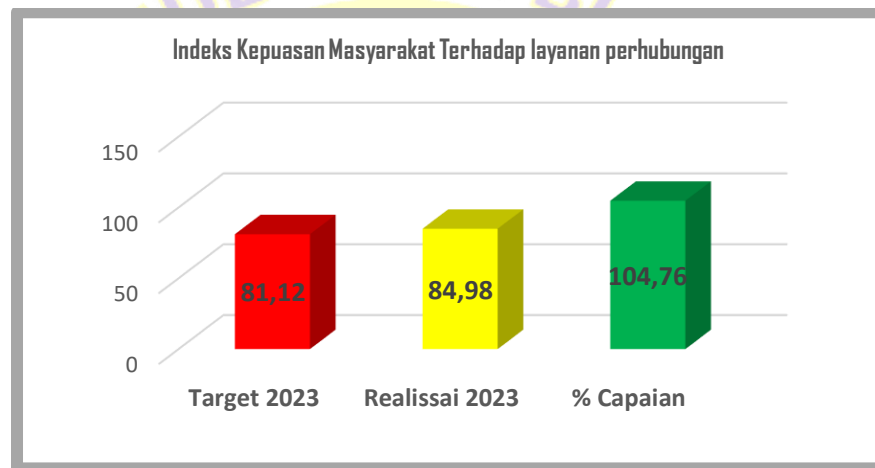
- 2) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu kurang optimalnya ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena berkembangnya kebutuhan prasarana

jalan.

- 3) Solusi yang ditempuh yaitu penganggaran secara berkelanjutan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan, memperoleh capaian sebesar **104,76%**

Diagram 2:
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan angkutan sekolah gratis sebesar 87,92. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan uji kendaraan bermotor sebesar 84,26 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar 82,76.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* adalah rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan

bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum

❖ Pada indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* tercapai 84,98% dari target 81,12% dengan persentase capaian sebesar 104,76%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

❖ Faktor pendorong : Terdapatnya SDM yang mencukupi dan berkompeten

2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, tidak ada kendala mendasar yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini.

3) Meskipun tidak ada kendala dan solusi yang harus dilakukan, namun peningkatan kualitas layanan perhubungan akan selalu kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kota Blitar seperti:

❖ Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dalam hal ini adalah layanan angkutan sekolah gratis. Sehingga kedepan perlu adanya peningkatan kecepatan waktu layanan dengan melakukan penambahan armada angkutan bus sekolah;

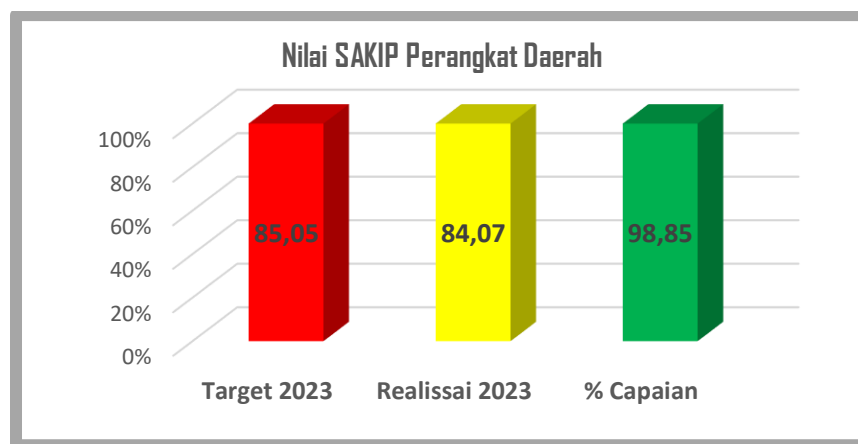
❖ Penanganan pengaduan pengguna layanan, dalam hal ini adalah aduan layanan parkir tepi jalan umum. Sehingga perlu adanya penetiban dan pembinaan kinerja juru parkir tepi jalan umum;

❖ Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, dalam hal ini adalah layanan uji berjala kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi Uji Berkala bukan lagi merupakan Retribusi jasa

umum, sehingga pada tahun 2024 biaya uji berkala kendaraan bermotor akan digratiskan.

- c. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* memperoleh capaian sebesar **98,85%**

Diagram 3:
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



1) Keterangan :

Pada indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 84,07 dari target 85,05 dengan persentase capaian sebesar 98,85%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. A

2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, terdapat beberapa kendala/ factor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini, yaitu diantaranya :

- ❖ Belum termanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
- ❖ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan

untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target yang telah diperjanjikan;

- ❖ Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisien kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

3) Solusi/Rencana Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

- ❖ Koordinasi dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala;
- ❖ Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	101,86%	V			
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	104,76%	V			
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,85%	V			
Rata-rata keberhasilan capaian Sasaran Strategis		101,82	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Berhasil**, dengan nilai capaian kinerja **101,82%**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya diuraikan pada tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022– 2023

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		% Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93 %	94%	92,31 %	95,75 %	99,26 %	101,86 %
2	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,10	81,12	81,86	84,98	100,94 %	104,76 %
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,05	85,40	84,07	101,67 %	98,85%

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022-2023 diatas dapat disimpulkan bahwa:

❖ Persentase Capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya sarana*

dan prasarana perhubungan dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 99,26% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 101,86%.

- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 100,94% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 104,76%.
- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kinerja perangkat daerah* dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 101,67% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 98,85%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 sampai dengan periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2021-2026
Dinas Perhubungan Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	97 %	95,75%	98,71 %
2	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,18 Baik	84,98 Baik	104,68 %
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,30 A	84,07 A	98,56 %

Berdasarkan tabel diatas ada 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasi tahun 2023 sudah melebihi target akhir Renstra, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2023 Dinas Perhubungan tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya (Dishub Kabupaten Tulungagung), dengan perolehan data sebagaimana tabel III.5 berikut :



Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2023

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar
Meningkatnya Kinerja Transportasi	- Persentase Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi (Kabupaten Tulungagung) - Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Kota Blitar)	85 %	94 %	87,50%	95,75 %	102,94 %	101,86 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tabel III.6 berikut akan kami sajikan pagu anggran, realisasi anggaran dan sisa pagu anggaran beserta persentase realisasinya.

Tabel III.6
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Blitar

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.624.718.972,00	2.578.749.292,79	98,25	45.969.679,21	1,75
<i>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	2.624.718.972,00	2.578.749.292,79	98,25	45.969.679,21	1,75
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	113.215.844,00	111.133.495,00	98,16	2.082.349,00	1,84
Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	529.633.636,00	520.982.329,00	98,37	8.651.307,00	1,63

1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	111.267.906,00	111.044.232,00	99,80	223.674,00	0,20
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.870.601.586,00	1.835.589.236,79	98,13	35.012.349,21	1,87
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.069.733.788,00	8.821.187.137,00	97,26	248.546.651,00	2,74
<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>9.069.733.788,00</i>	<i>8.821.187.137,00</i>	<i>97,26</i>	<i>248.546.651,00</i>	<i>2,74</i>
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.193.020.682,00	1.132.557.670,00	94,93	60.463.012,00	5,07
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95.517.064,00	90.971.958,00	95,24	4.545.106,00	4,76
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	7.576.278.482,00	7.395.099.190,00	97,61	181.179.292,00	2,39
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204.917.560,00	202.558.319,00	98,85	2.359.241,00	1,15
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	294.666.911,00	290.258.339,00	98,50	4.408.572,00	1,50
<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>294.666.911,00</i>	<i>290.258.339,00</i>	<i>98,50</i>	<i>4.408.572,00</i>	<i>1,50</i>

1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	101.697.251,00	100.604.669,00	98,93	1.092.582,00	1,07
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	192.969.660,00	189.653.670,00	98,28	3.315.990,00	1,72
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.659.524.481,00	1.644.446.226,00	99,09	15.078.255,00	0,91
<i>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>1.659.524.481,00</i>	<i>1.644.446.226,00</i>	<i>99,09</i>	<i>15.078.255,00</i>	<i>0,91</i>
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	667.559.732,00	660.465.548,00	98,94	7.094.184,00	1,06
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	991.964.749,00	983.980.678,00	99,20	7.984.071,00	0,80
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	240.840.161,00	234.490.070,00	97,36	6.350.091,00	2,64
<i>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>240.840.161,00</i>	<i>234.490.070,00</i>	<i>97,36</i>	<i>6.350.091,00</i>	<i>2,64</i>
Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	123.061.697,00	119.950.850,00	97,47	3.110.847,00	2,53

1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	92.778.464,00	89.539.220,00	96,51	3.239.244,00	3,49
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.299.445.849,00	1.269.108.500,00	97,67	30.337.349,00	2,33
<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>1.299.445.849,00</i>	<i>1.269.108.500,00</i>	<i>97,67</i>	<i>30.337.349,00</i>	<i>2,33</i>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.299.445.849,00	1.269.108.500,00	97,67	30.337.349,00	2,33
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.745.958.484,00	6.485.733.944,98	96,14	260.224.539,02	3,86
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>53.479.054,00</i>	<i>52.612.630,00</i>	<i>98,38</i>	<i>866.424,00</i>	<i>1,62</i>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.839.560,00	8.723.500,00	98,69	116.060,00	1,31
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.639.494,00	43.889.130,00	98,32	750.364,00	1,68

1	2	3	4	5	6
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.953.204.045,00	4.743.171.874,00	95,76	210.032.171,00	4,24
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.045.829,00	4.742.385.894,00	95,77	209.659.935,00	4,23
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	1.158.216,00	785.980,00	67,86	372.236,00	32,14
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	163.428.036,00	162.005.700,00	99,13	1.422.336,00	0,87
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.492.500,00	42.735.000,00	98,26	757.500,00	1,74
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	119.935.536,00	119.270.700,00	99,45	664.836,00	0,55
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	438.310.364,00	426.207.183,00	97,24	12.103.181,00	2,76
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.865.043,00	6.857.925,00	99,90	7.118,00	0,10
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.458.008,00	19.773.200,00	96,65	684.808,00	3,35
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.837.677,00	9.598.870,00	88,57	1.238.807,00	11,43
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.084.000,00	53.236.500,00	87,15	7.847.500,00	12,85
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.673.536,00	9.386.800,00	97,04	286.736,00	2,96

1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	8.100.000,00	7.536.000,00	93,04	564.000,00	6,96
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.979.600,00	304.649.888,00	99,57	1.329.712,00	0,43
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.312.500,00	15.168.000,00	99,06	144.500,00	0,94
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.784.445,00	66.195.000,00	97,66	1.589.445,00	2,34
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	#DIV/0! !	0,00	#DIV/0! !
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6.780.488,00	6.780.000,00	99,99	488,00	0,01
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.003.957,00	59.415.000,00	97,40	1.588.957,00	2,60
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.477.200,00	635.568.953,98	98,62	8.908.246,02	1,38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.527.200,00	225.715.682,00	98,34	3.811.518,00	1,66
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.950.000,00	409.853.271,98	98,77	5.096.728,02	1,23
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.275.340,00	399.972.604,00	94,05	25.302.736,00	5,95

1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.893.100,00	291.820.504,00	92,38	24.072.596,00	7,62
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.582.240,00	22.312.100,00	98,80	270.140,00	1,20
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.800.000,00	25.840.000,00	96,42	960.000,00	3,58
TOTAL	21.934.888.646,00	21.323.973.509,77	97,21	610.915.136,23	2,79

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada Sasaran Strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	11.989.119.671,00	54,66%
2	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	3.199.810.491,00	14,59%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.745.958.484,00	30,75%
Total Anggaran			21.934.888.646,00	100 %

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	94	95,75	101,86	11.989.119.671,00	11.690.194.768,79	97,51
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas</i>	<i>%</i>	<i>0,32</i>	<i>1,72</i>	<i>537,50</i>	<i>2.624.718.972,00</i>	<i>2.578.749.292,79</i>	<i>98,25</i>
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	2	2	100,00	2.624.718.972,00	2.578.749.292,79	98,25
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>99,50</i>	<i>99,51</i>	<i>100,01</i>	<i>9.069.733.788,00</i>	<i>8.821.187.137,00</i>	<i>97,26</i>
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	5	5	100,00	9.069.733.788,00	8.821.187.137,00	97,26
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>87,00</i>	<i>96,97</i>	<i>111,46</i>	<i>294.666.911,00</i>	<i>290.258.339,00</i>	<i>98,50</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	jenis	12	12	100,00	294.666.911,00	290.258.339,00	98,50
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					101,86	11.989.119.671,00	11.690.194.768,79	97,51
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	indeks	81,12	84,98	104,76	3.199.810.491,00	3.148.044.796,00	98,38
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis</i>	<i>Indeks</i>	<i>83,15</i>	<i>87,92</i>	<i>105,74</i>	<i>1.659.524.481,00</i>	<i>1.644.446.226,00</i>	<i>99,09</i>
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	84,00	95,92	114,19	1.659.524.481,00	1.644.446.226,00	99,09
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	<i>Indeks</i>	<i>81,75</i>	<i>84,26</i>	<i>103,07</i>	<i>240.840.161,00</i>	<i>234.490.070,00</i>	<i>97,36</i>
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	95,00	94,51	99,48	240.840.161,00	234.490.070,00	97,36
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	<i>Indeks</i>	<i>82,10</i>	<i>82,76</i>	<i>100,80</i>	<i>1.299.445.849,00</i>	<i>1.269.108.500,00</i>	<i>97,67</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	77	77,31	100,40	1.299.445.849,00	1.269.108.500,00	97,67
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					104,76	3.199.810.491,00	3.148.044.796,00	98,38
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,05	84,07	98,85	6.745.958.484,00	6.485.733.944,98	96,14
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>indeks</i>	<i>80,96</i>	<i>86,17</i>	<i>106,44</i>	<i>6.745.958.484,00</i>	<i>6.485.733.944,98</i>	<i>96,14</i>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	53.479.054,00	52.612.630,00	98,38
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	4.953.204.045,00	4.743.171.874,00	95,76
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	163.428.036,00	162.005.700,00	99,13
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	438.310.364,00	426.207.183,00	97,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100,00	100,00	100,00	67.784.445,00	66.195.000,00	97,66
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	644.477.200,00	635.568.953,98	98,62
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	425.275.340,00	399.972.604,00	94,05
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					98,85	6.745.958.484,00	6.485.733.944,98	96,14

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 adalah:

- ❖ Sasaran 1: “Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 101,86% dengan persentase capaian anggaran sebesar 97,51%;
- ❖ Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 104,76% dengan persentase capaian anggaran sebesar 98,38%;
- ❖ Sasaran 3: “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 98,85% dengan persentase capaian anggaran sebesar 96,14%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 ditunjukkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik</i>	<i>101,86</i>	<i>97,51</i>	<i>1,04</i>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	537,50	98,25	5,47
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	100,01	97,26	1,03

1	2	3	4	5
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	111,46	98,50	1,13
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		101,86	97,51	1,04
<i>Meningkatnya kualitas layanan perhubungan</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan</i>	<i>104,76</i>	<i>98,38</i>	<i>1,06</i>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	105,74	99,09	1,07
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	103,07	97,36	1,06
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	100,80	97,67	1,03
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		104,76	98,38	1,06
<i>Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>98,85</i>	<i>96,14</i>	<i>1,03</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,44	96,14	1,11
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		98,85	96,14	1,03

Dari tabel diatas, Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

- ❖ Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,04. Hal ini dapat dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,86% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,51%.

- ❖ Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,06. Hal ini juga dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 104,76% membutuhkan anggaran sebesar 98,38%.
- ❖ Sasaran 3: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, tingkat efisiensinya sebesar 1,03. Hal ini dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 98,85% membutuhkan anggaran sebesar 96,14%.
- ❖ Dari ketiga sasaran kinerja Perangkat Daerah diatas semua mencapai efisiensi, hal ini disebabkan beberapa faktor pendorong yaitu tercukupinya SDM yang berkompeten dan perencanaan yang baik dalam penyusunan target kinerja dan anggaran serta monev pelaksanaan kegiatan secara berkala guna optimalisasi capaian kinerja.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan mendapatkan satu penghargaan di Tingkat Polda Jawa Timur dan Tingkat Nasional yaitu **Penghargaan Terbaik I sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas** yang diserahkan di Polda Jawa Timur pada tanggal 25 September 2023 oleh Kapolda Jawa Timur kepada Kasatlantas Blitar Kota dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Penghargaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Polres Kota Blitar dalam upaya mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, tertib dan lancar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas Perhubungan kota Blitar tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar. Dari hasil capaian Indikator Kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa:

Sasaran 1, Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2023 mencapai 95.75% dari target 94% dengan capaian **101,86%**, sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2023 mencapai 84,98 dari target 81,12 dengan tingkat capaian sebesar **104,76%**. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran 3, Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2023 mencapai 84,07 dari target 85,05 dengan tingkat capaian **98,85%**. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Anggaran Belanja yang teralokasi untuk Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 sebesar **Rp 21.934.888.646,00** (*Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan terserap **Rp. 21.323.973.509,77** (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen*) atau sebesar **97,21%** dari jumlah pagu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Berhasil, namun demikian masih tetap dijumpai beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja Perangkat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah Perbaikan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, ada beberapa langkah strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai sesuai dengan perkembangan transportasi;
2. Optimalisasi pengelolaan Terminal tipe C;
3. Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis:

4. Optimalisasi kinerja juru parkir tepi jalan umum;
5. Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas;
6. Optimalisasi layanan uji kendaraan dengan penambahan dan pemeliharaan alat uji sehingga memudahkan dan mempercepat proses layanan uji berkala;
7. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
9. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	memadai	berkelanjutan	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
2	Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjang Terminal Tipe c	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
3	Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis	Pelaksanaan operasionalisasi angkutan sekolah gratis dan upaya Penambahan armada angkutan sekolah gratis (bus sekolah) melalui usulan ke Kementerian Perhubungan maupun bantuan CSR	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√
		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
4	Optimalisasi kinerja juru parkir dan dalam rangka peningkatan PAD parkir	Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian juru parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	√	√	√
		Peningkatan kinerja juru parkir dengan melaksanakan studi tiru/ komparasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin			√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Pengadaan system manajemen administrasi parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		√	
5	Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas	Sosialisasi kelalulintasan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan	√		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
		Sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan di berbagai jenjang terkait keselamatan dan tertib berlalu lintas	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			√
6	Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor	Pengadaan alat uji berkala	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	√		√
7	Memfaatkan hasil monitoring dan	Koordinasi dan evaluasi capaian kinerja	- Program Program Penunjang Urusan	√		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Perangkat Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
8	Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
9	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas	Monev akuntabilitas dalam upaya	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan	√	√	

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar, sehingga secara bersama-sama kita bisa membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah menuju peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 05 Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar

JUARI, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651204 198603 1006

Lampiran-lampiran

- I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2023



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat
MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN				SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2023	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan	B 0,22	C 0,465	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	99,35%	94%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal	
										Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai	
										Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
					Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Baik 80,11	Baik 81,12	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah	
											Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT	
											Optimalisasi pengelolaan parkir	
											Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	
											Penerbitan pelanggaran lalu lintas	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,05	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,05	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Perangkat Daerah	Optimalisasi layanan administrasi kesekretariatan	

Blitar, 04 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



JUARI, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651204 198603 1 006

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2023**

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PAGU
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	94%	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	0,32	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	13 1 laporan	14 113.215.844
										Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6 unit	529.633.636
										Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	2 dokumen	111.267.906
										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.870.601.586
					Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,5%	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlekapan jalan yang tersedia	5 jenis	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	48 unit	1.193.020.682
										Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlekapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	23 unit	95.517.064
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	5.994 unit	7.576.278.482
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah perlekapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	50 unit	204.917.560
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	87%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	12 jenis	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	1 unit	101.697.251
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	12 unit	192.968.660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Baik (81.12)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	83.15 Baik	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	84%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9 unit	667.559,732
										Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	991.964,749
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	81.75 Baik	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	95,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	5.100 unit	123.061.697
										Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1.000 dokumen	25.000.000
										Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	92.778.464
					IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	82.10 Baik	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase parkir yang mematuhi aturan/SOP juru parkir	77,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.299.445.849
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 85.05	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik (80.96)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	8.839.560
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	44.639.494
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	4.952.045.829
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.158.216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	43.492.500
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 orang	119.935.536
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.865.043
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	20.458.008
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	10.837.677
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	61.084.000
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.673.536
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	8.100.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 laporan	305.979.600
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	15.312.500
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	6.780.488
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	61.003.957
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	229.527.200
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	414.950.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Damarinitahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	315.893.100
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	22.582.240
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	60.000.000
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	26.800.000

Blitar, Oktober 2023



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUARI, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

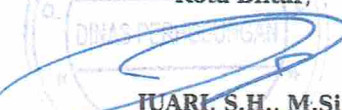
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

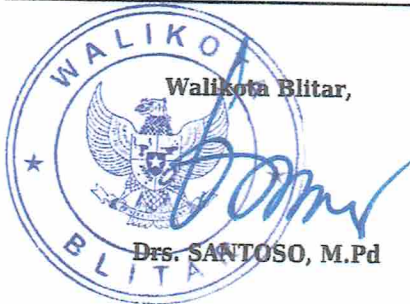
Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
Kota Blitar,


JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	94.00(%)
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	81.12(Indeks)
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.05(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15,188,930,162.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,745,958,484.00	DAU dan Pendapatan Bagi Hasil
Total:		21,934,888,646.00	



Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
Kota Blitar,



PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Ket.
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	94%	95,75%	101,86	- Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebesar 98,84%. - Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 96,97% - Persentase fasilitas keselamatan dalam kondisi baik sebesar 96,29% - Persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 90,91% Sehingga sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2023 mencapai 95,75% dari target 94% dengan tingkat Capaian sebesar 101,86%.	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.989.119.671,00	11.690.194.768,79	97,51	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 97,51% dari pagu yang ditetapkan
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	81,12 Baik	84,98 Baik	104,76	Hasil IKM diambil dari data E-SUKMA periode 15 Desember 2023 Pada sasaran ini, nilai IKM layanan angkutan sekolah gratis adalah 87,92, layanan uji kendaraan bermotor adalah 84,26 sedangkan layanan parkir tepi jalan umum adalah 82,76. Berdasarkan data diatas, maka untuk capaian sasaran ini mencapai 99,43%.	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.199.810.491,00	3.148.044.796,00	98,38	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 98,38% dari pagu yang ditetapkan
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	85,05 A	84,07 A	98,85	Tatap pengukuran kinerja pada Implementasi SAKIP belum optimal, perlu adanya penambahan data dukung capaian kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.745.958.484,00	6.485.733.944,98	96,14	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 96,14% dari pagu yang ditetapkan

Blitar, 05 Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar

